



**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA LAU BEKERI KECAMATAN
KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh

RIAHTA FRANSISKA KELIAT
1915100192

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA LAU BEKERI KECAMATAN KUTALIMBARU)

NAMA : RIAHTA FRANSISKA KELIAT
N.P.M : 1915100192
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 04 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Irawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIAHTA FRANSISKA KELIAT
NPM : 1915100192
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA
DESA LAU BEKERI KECAMATAN
KUTALIMBARU KABUPATEN DELI
SERDANG)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



Riahta Fransiska Keliat
NPM 1915100192

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIAHTA FRANSISKA KELIAT
Tempat / Tanggal Lahir : Gunung Tinggi / 18-07-1994
NPM : 1915100192
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : DUSUN I SAMPE CITA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Mei 2024



embuat pernyataan

RIAHTA FRANSISKA KELIAT

A B S T R A K

Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa dan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan membagikan kuisioner, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Lau Bekeri dengan jumlah sampel 80 responden. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa.

A B S T R A C T

This research is entitled "The Influence of Transparency, Accountability and Community Participation on Village Financial Management (Case Study in Lau Bekeri Village, Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency)". This research aims to determine the influence of transparency, accountability, and community participation. partially influence village financial management and to determine the simultaneous influence of transparency, accountability, and community participation on village financial management. The data collection method used was by distributing questionnaires, the population in this study was the community in Lau Bekeri village with a sample size of 80 respondents. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression with the f test and determination test. The results of this research show that the influence of transparency, accountability and community participation has a partial and simultaneous effect on village financial management.

Keywords: Transparency, Accountability, Community Participation, Village Financial Management.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Apa saja yang diusahakan tanpa pertolongan Allah SWT maka tidak akan bisa terwujud, dan apa saja yang dilakukan bukan untuk mencari ridho Allah SWT maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan berlangsung lama”. (Hadist Riwayat Ibnu Taimiyyah Rahimullah)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Allah SWT yang memberikan ketajaman hati dan fikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kedua orangtua saya yang saya cintai dan sayangi yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta semangat untuk saya, agar saya menjadi orang yang lebih baik.
- ❖ Keluarga besar tercinta saya.
- ❖ Dosen pembimbing saya dan dosen-dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan mendidik saya dari awal perkuliahan sampai dengan selesai perkuliahan.
- ❖ Teman-teman sepekerjaan, dan teman-teman seperjuangan seangkatan tersayang.
- ❖ Almamater saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”**. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini memiliki kesalahan, Maka itu bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat diharapkan, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si. selaku Dekan fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Irawan, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak menuangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan memberikan kritikan dan saran terhadap proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si. dosen pembimbing II yang sudah banyak menuangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan

memberikan kritik dan saran terhadap proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis di bangku kuliah sampai dengan selesai.
7. Bapak Adir Ginting Selaku Kepala Desa Lau Beker Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang beserta aparaturnya yang telah membantu penulis mengumpulkan data penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak P. Keliat dan Ibu S. Br. Ginting, serta kakak, abang dan adik saya yang telah memberikan iringan doa, semangat, motivasi dan dukungan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah banyak memberikan semangat, saran dan masukan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan instansi yang bersangkutan. Dan penulis berharap dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu

Medan, Maret 2024

Riahta Fransiska Keliat
NPM 1915100192

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Definisi Transparansi	13
2.1.3 Definisi Akuntabilitas	14
2.1.4 Definisi Partisipasi Masyarakat	15
2.1.5 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Hipotesa Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32

3.3 Definisi Operasional Variabel.....	33
3.4 Populasi dan Sampel	38
3.5 Jenis dan Sumber Penelitian	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
3.7.1 Pengujian Kualitas Data.....	42
3.7.2 Statistik Deskriptif	43
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda	46
3.7.5 Pengujian Hipotesis.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.1.2 Hasil Analisis Data	54
4.1.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden	54
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	57
4.1.4 Uji Instrumen Penelitian	72
4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	75
4.1.6 Uji Analisis Regresi Linier Ganda	79
4.1.7 Uji Hipotesis	81
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	84

BAB V KESEIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lau Bekeru Tahun 2019-2021	4
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	33
Tabel 3.2 Tabel Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.3 Skala Likert	41
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Responden.....	54
Tabel 4.2 Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.3 Umur Responden.....	55
Tabel 4.4 Status Responden	56
Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir Responden	56
Tabel 4.6 Pekerjaan Responden	57
Tabel 4.7 Penilaian Responden Terhadap Variabel X ₁	58
Tabel 4.8 Penilaian Responden Terhadap Variabel X ₂	61
Tabel 4.9 Penilaian Responden Terhadap Variabel X ₃	65
Tabel 4.10 Penilaian Responden Terhadap Variabel Y	69
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Data	73
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Reabilitas	74
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Kolmogrov Smirnov (K-S).....	75
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Multikolinieritas	77
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Liner Berganda.....	80
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi	81
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji t)	82
Tabel 4.18 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi Desa Lau Bekeri.....	52
Gambar 4.2 Lambang Kabupaten Deli Serdang	53
Gambar 4.3 Histogram	76
Gambar 4.4 Normal P.P Slot.....	77
Gambar 4.4 Uji Heterokedastitas	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 pasal 1 tahun 2018 tentang desa merupakan suatu lembaga masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah. Berdasarkan perannya desa dalam pembangunan pemerintahan maka diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan desa sehingga pembangunan desa setiap wilayah dapat berjalan dengan optimal.

Pengelolaan keuangan desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 pasal 29 Tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai prosedur dalam pengelolaan keuangan desa. sedangkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu yang berhubungan dengan uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun unsur dari aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat. (Yuliansyah, 2016).

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016). Transparansi merupakan salah satu aspek yang berlandaskan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terbentuknya tata pemerintahan yang baik bagi dimana adanya keterbukaan dalam laporan keuangan desa, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Selain unsur transparansi untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan asas yang memutuskan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2018).

Aspek selanjutnya dalam *good governance* adalah partisipasi masyarakat menurut Mardiasmo (2018) partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung lewat lembaga perwakilan yang mampu menyalurkan aspirasinya yang bagian subjek atau permusyawaratan dalam pembangunan desa, yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan desa yang disebut musrenbang, aspek kontrol dan pengawasan pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa. Partisipasi masyarakat bukan saja sebagai penunjang pengambilan keputusan pengelolaan keuangan desa tetapi juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi dalam pengelolaan keuangan desa yang ada,

partisipasi ini dapat meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan desa.

Namun, pada kenyataannya masih banyak pemerintahan desa yang tidak melaksanakan ketiga unsur dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut. Hal ini dapat dilihat dari catatan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dari 2017 terdapat 110 kasus korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku diantaranya 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa, sementara 32 orang lainnya merupakan perangkat desa. Jumlah kerugian negara mencapai sedikitnya Rp 30 milyar.

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa yakni Rp 19,6 milyar. Hal ini disebabkan dari minimnya akses keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi, kompetensi yang rendah menyebabkan kesalahan yang kerap terjadi dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, belum optimalnya lembaga desa dalam melaksanakan tugasnya (dikutip dari www.tribunnews.com).

Fenomena yang sama terjadi di Kabupaten Deli Serdang yang terjadi di salah satu Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengatakan “penahanan terhadap Kepala Desa telah merugikan keuangan negara dari dana APBN untuk pembangunan lima infrastruktur di Desa Percut, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini karena belum adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh desa tersebut”. (dikutip dari www.merdeka.com).

Bukan saja tentang pelanggaran korupsi dana desa. kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui bidang penerangan hukum menggelar kegiatan penerangan hukum di kecamatan kotalimbaru dengan topik pemanfaatan dana desa dan penanganan masalah gizi buruk yang di hadiri oleh bapak camat kotalimbaru dan 14 kepala desa kotalimbaru, beliau menyampaikan bahwa di kabupaten deli serdang mengalami masalah gizi buruk yang semakin meningkat dimana pada tahun 2022 tingkat gizi buruk sebesar 12,5% namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan gizi buruk menjadi 13,9% lebih.

Hal ini menjadi kekhawtiran pemerintah setempat dan perlu di perhatikan kembali dengan melibatkan seluruh perangkat desa, perangkat kesehatan dan masyarakat agar segera dapat penanganan yang tepat. Dengan adanya sosialisasi ini dapat mengatasi masalah gizi buruk yang terjadi di Deli Serdang dan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan tidak salah arah dalam memanfaatkan dana desa yang telah disalurkan pemerintah pusat (www.e-news.id)

Desa Lau Bekeri adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini adalah lampiran realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Desa Lau Bekeri:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)
Desa Lau Bekeri Tahun 2019-2021

(dalam ribuan rupiah)

No	Pendapatan	2019		2020		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	PAD Desa (Hasil Bumdesa)	0	0	0	0	Rp. 19.470	Rp. 19.470
2	Dana Desa (DD)	Rp. 836.933	Rp. 836.933	Rp. 846.775	Rp. 846.775	Rp. 818.928	Rp. 818.928

3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 92.436	Rp. 92.436	Rp. 581.923	Rp. 581.923	Rp. 138.599	Rp. 138.599
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 545.418	Rp. 545.418	Rp. 464.577	Rp. 464.577	Rp. 453.577	Rp. 453.577
5	Bantuan Keuangan Pusat/Daerah	Rp. 637.854	Rp. 637.854	Rp. 117.346	Rp. 117.346	Rp. 611.646	Rp. 611.646
6	Pendapatan lain-lain yang sah	Rp. 1.432	Rp. 1.432	0	0	0	0
Jumlah Total Pendapatan		Rp. 2.114.073	Rp. 2.114.073	Rp. 2.010.621	Rp. 2.010.621	Rp. 2.042.220	Rp. 2.042.220

Sumber: Data Kantor Desa Lau Bekeri

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) desa Lau Bekeri pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak ada, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) hanya ada pada tahun 2021 sebesar Rp. 19.470.325 yang merupakan pendapatan asli desa dari hasil BUMDes, dan dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah total pendapatan desa sebesar Rp. 2.114.073.410 yang terinci dari pendapatan Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Pemerintah Pusat/daerah dan Pendapatan Lainnya.

Pada tahun 2020 jumlah total pendapatan desa sebesar Rp. 2.010.621.000 yang terinci dari pendapatan Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Pemerintah Pusat/daerah dan Pendapatan Lainnya dan pada tahun 2021 jumlah total pendapatan desa sebesar Rp. 2.042.220.650 yang terinci dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Pemerintah Pusat/daerah dan Pendapatan Lainnya, hal ini dapat terlihat bahwa total pendapatan pada desa Lau Bekeri dapat di katakan cukup besar sehingga sangat rawan terjadinya akan penyelewengan yang mengarah pada korupsi bagi aparatur desa itu sendiri.

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Adir selaku kepala desa Lau Bekeri. Setelah dilakukan wawancara bersama Bapak Adir selaku kepala desa Lau Bekeri ada beberapa hambatan yang terjadi yaitu dimana pemerintahan desa belum memiliki website resmi untuk penyampaian informasi kepada publik, masyarakat hanya bisa langsung mendatangi kantor desa jika ada keperluan informasi yang dibutuhkan serta ada titipan kegiatan anggaran instansi tertentu yang wajib diselesaikan dari pemerintah daerah yang membuat keterbukaan informasi terhambat ke publik sedangkan sumber daya perangkat desa kurang memadai sehingga perangkat desa menunda beberapa kegiatan sebelumnya yang mengakibatkan keterlambatan informasi yang seharusnya sesuai target dan setiap musyawarah desa hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat desa dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat identifikasi masalah yaitu:

1. Transparansi laporan pengelolaan keuangan desa yang cenderung masih rendah karena akses yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat

untuk mendapatkan informasi dokumen anggaran masih atas dasar permintaan baik secara formal maupun informal.

2. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban anggaran laporan keuangan desa yang cenderung masih rendah karena kurang ketersediaan informasi dan kurang dapat diaksesnya dokumen-dokumen pengelolaan desa Lau Bekerri secara publik berbasis teknologi.
3. Keterlibatan partisipasi masyarakat yang cenderung masih rendah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mengenai akses informasi laporan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membatasi masalah agar tetap terfokus pada pokok permasalahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, maka penulis membatasi masalah hanya pada “Transparansi, Akuntabilitas dan Pengaruh Masyarakat terhadap laporan keuangan desa Lau Bekerri Kecamatan Kutalimbaru”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka terdapat beberapa yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

- a. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekerri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang?

- b. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang?
- c. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang?
- d. Apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang?
- b. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang?
- c. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang?

- d. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang?

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian dibidang pengelolaan keuangan desa.
- c. Dapat digunakan untuk masukan bagi Pemerintah desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru.
- d. Hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa digunakan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dibidang pengelolaan keuangan desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Andika Subandra (2022), Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang)”. Perbedaan penelitian ini terletak pada:

1. Data penelitian: pada penelitian terdahulu menggunakan data pengelolaan keuangan desa Pebenaan tahun 2021 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data pengelolaan keuangan desa Lau Bekeri tahun 2019, 2020 dan 2021
2. Wilayah penelitian: dimana wilayah penelitian terdahulu di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang
3. Waktu penelitian: dimana penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2022 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023
4. Perbedaan penelitian terjadi pada tahun data pengelolaan keuangan desa, wilayah penelitian dan waktu penelitian yang menjadikan perbedaan sehingga keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Grand Theory yang melandasi penelitian ini adalah teori keagenan, hubungan kontraktual dapat terjadi apabila pihak pemilik memberikan tugas kepada pihak manajemen untuk melaksanakan proses manajemen perusahaan (Achmad, 2018). Berkaitan dengan lembaga sektor publik, dalam hal ini *principals* merupakan masyarakat dan *agents* merupakan pemerintah desa (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Menurut Ramadona (2016) teori agensi ialah konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak prinsipal ialah pihak yang memberikan arahan kepada pihak lain yaitu agen. Implikasi dari teori keagenan dengan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi perangkat desa sebagai lembaga pengabdian masyarakat yang di percaya masyarakat untuk menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat, melayani masyarakat sebaik mungkin, dan mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian seluruh tujuan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat dapat terwujud secara maksimal. Pemerintah yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat desanya. Menurut Scoot (2015) teori agensi adalah hubungan atau kontrak kerja antara prinsipal dan agensi prinsip pada teori ini yaitu adanya hubungan kerja antara pihak memberi wewenang yaitu pemerintah dengan pihak menerima yaitu perangkat

desa. Sedangkan menurut R.A Supriyono (2016) teori keagenan merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang perilaku prinsipal terhadap wewenang yang akan diberikan kepada agensi.

Dalam pelaporan keuangan konseptual berbasis teori, pemerintah desa sebagai agen berkewajiban untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna informasi dalam keuangan pemerintah yang bertindak sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta prinsip-prinsip fungsi politik, ekonomi dan sosial secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam organisasi sektor publik yang dimaksud dengan prinsipal ialah pemerintah dan agen adalah kepala desa dan perangkat desa. Teori keagenan digunakan untuk mengawasi serta mengontrol aliran dana desa yang didapat dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh pemerintah desa (Halim, 2014) berpendapat bahwa kasus keagenan pada pemerintah wilayah berlangsung secara terus menerus serta saling terkait dalam seluruh proses pelaporan dan pertanggungjawaban wewenang.

Hubungan dari teori keagenan dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksistensi perangkat desa sebagai lembaga pengabdian masyarakat yang dipercaya masyarakat untuk menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat, melayani masyarakat sebaik mungkin, dan mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang diberikan kepadanya. Dengan demikian seluruh tujuan pemerintah desa dalam mensejahterahkan masyarakat dapat terwujud secara optimal, pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kinerjanya.

2.1.2 Definisi Transparansi

Menurut Dwiyanto (2015) transparansi adalah memberikan suatu informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, transparansi memberikan penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat.

Transparansi menurut Mardiasmo (2018) merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2016:19) transparansi memiliki 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Informatif yaitu pemberian informasi berita tentang penjelasan mekanisme atau sistem kerja yang jelas, laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan dapat di akses oleh semua pihak.
2. Keterbukaan yaitu memberikan hak informasi kepada khalayak umum.
3. Pengungkapan yaitu pengungkapan kepada masyarakat atas aktifitas dan kinerja finansial dari hasil kegiatan.

2.1.3 Definisi Akuntabilitas

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia akuntabilitas ialah aktifitas pertanggungjawaban dimana kesadaran seseorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak adanya atasan. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam membentuk penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *Good Governance* yang dimana penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisiensi, efektif dan seimbang sinergitas konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pemberi kerja untuk menjelaskan karakteristik kinerja organisasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau sumber dana dengan menggunakan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Berkenaan dengan pernyataan pertanggungjawaban secara umum dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban badan yang berwenang dalam mengelola dana politik.

Akuntabilitas merupakan ukuran yang memperlihatkan apakah kegiatan birokrasi publik atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya ialah melayani masyarakat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Dengan demikian bahwa akuntabilitas merupakan kesediaan pelayanan publik memberikan

pelayanan publik dan mampu menjawab pertanyaan sesuai kebutuhan masyarakat umum.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas ialah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang merupakan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Setyaningrum (2017) terdapat 5 indikator akuntabilitas yaitu:

1. Keputusan secara tertulis
2. Informasi akurat
3. Kejelasan terhadap sasaran kebijakan yang diambil
4. Informasi terbuka secara umum baik melalui media sosial yang dapat di akses publik.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

2.1.4 Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat pada proses pengelolaan keuangan yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi yang dilaksanakan serta mengambil bagian dalam bentuk aktivitas masyarakat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung lewat lembaga perwakilan yang mampu menyalurkan aspirasinya.

Menurut Prayogi (2019) terdapat 5 indikator partisipasi masyarakat yaitu:

1. Keterlibatan dalam rapat
2. Ketersediaan dalam penyampaian informasi
3. Keterlibatan dalam penyusunan rencana pembangunan
4. Keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dana desa
5. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai APBDesa juga dapat dilihat pada anggaran pendapatan belanja negara dan pendapatan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 pasal 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa APBDesa terdiri dari pendapatan asli desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Hal ini diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan agar menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalam undang-undang tersebut telah mencakup berbagai prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola

berdasarkan asas-asas pengelolaan Dana Desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan Prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tahapan pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 pasal 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Perencanaan

Pemerintah Desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Program pembangunan tahunan Desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih, setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan

pelayanan di desanya. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 611 pasal 29 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, kemudian rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati.
- b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, jika Bupati/Walikota dalam waktu yang ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Namun jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- d. Apabila evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya,

setelah pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa yang dimaksud.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

- e. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- f. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas, Surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
- g. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
 - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- h. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara

melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
 - 1) Buku kas umum.
 - 2) Buku kas pembantu pajak
 - 3) Buku Bank

4. Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa

- b. Laporan semester pertama; dan
- c. Laporan semester akhir tahun.
- d. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - (1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan “transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa”.

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya.

No	Peneliti	Variabel Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Andika Subandra (2022)	Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa pebenaan kecamatan	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat

		keritang kabupaten indragiri hilir)		berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa pebenaan kecamatan keritang.
2	Fitri Sukmawati (2019)	Pengaruh tansparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa di kabupaten Garut)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di kabupaten Garut
3	Maju Siregar (2020)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa paluh manis kecamatan	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa paluh

		Gebang kabuptaen Langkat)		manis kecamatan Gebang.
4	Riska Dwi Astuti (2021)	Pengaruh transparansi, akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Tamalate kabupaten Talakar	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Tamalate kabupaten Talakar
5	Afrijal (2018)	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa Pekon Sri Melati kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Pekon Sri Melati.

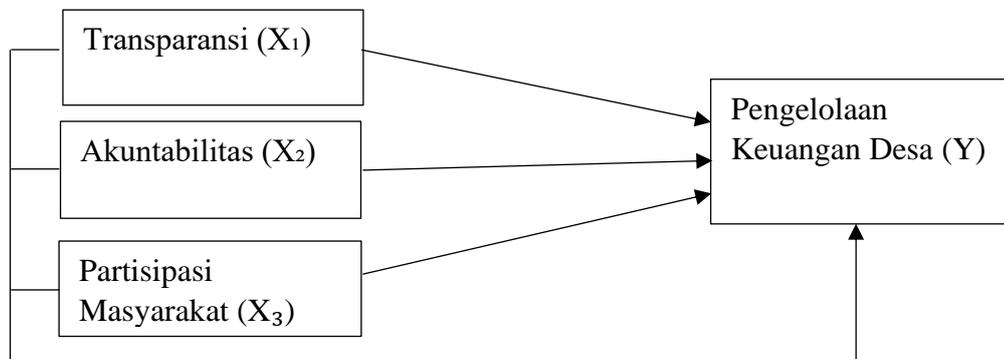
6	Norni Oktavia (2020)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di desa Talang Kebun kecamatan Lubuk Sandi kabupaten Seluma	Regresi Linier berganda	Hasil Penelitian ini ialah akuntabilitas dan transparansi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di desa Talang Kebun
7	Weny Ultafiah (2017)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> pada desa di kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> pada desa di kecamatan Merapi Barat.

8	Matia Andriani (2018)	Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Luk Kecamatan Rheee Kabupaten Sumbawa)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa sudi kasus pada Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa.
9	Wahyu Aditya (2022)	Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di kelurahan sekecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana di kelurahan sekecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

Sumber: Penulis (2023)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar teori yang telah melalui sintesa teori berdasarkan fakta, observasi serta telaah kepustakaan. Oleh karena itu akan memuat hubungan atau pengaruh dan kooperatif antara variabel yang terlibat dalam penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan teori pendukung, dalil atau konsep dasar penelitian. Kerangka konseptual dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya. Kerangka konseptual adalah model kerangka pemikiran yang berkaitan dengan bagaimana seorang menyusun teori atau menggabungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting. Kerangka konseptual merupakan fondasi dimana seluruh proyek penelitian didasarkan. Pada uraian atau teori-teori dari latar belakang masalah diatas maka berikut kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

1. Variabel dependen/variabel terikat (Y) yaitu variabelnya dipengaruhi oleh variabel independen, dalam penelitian ini variabel dependen ialah Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Variabel independen/variabel tidak terikat (X) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen, dalam penelitian ini variabel independen ada 3 yaitu:
- a. Transparansi (X_1)
 - b. Akuntabilitas (X_2)
 - c. Partisipasi Masyarakat (X_3)

2.4 Hipotesa Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka konseptual. Dan perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis, penelitian yang bersifat eksploratif dan sering juga penelitian deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Penelitian yang merumuskan hipotesis yaitu jenis penelitian kuantitatif, pada penelitian kuantitatif tidak merumuskan hipotesis tetapi akan menemukan hipotesis. Untuk hipotesis statistik sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jika probabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 di tolak

Jika probabilitas $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **H₀** : Ada pengaruh yang signifikan antara Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan antara Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

2. **H₀** : Ada pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

3. **H₀** : Ada pengaruh yang signifikan antara Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan antara Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

4. **H₀** : Ada pengaruh yang signifikan antara Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan antara Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan tinjauan teoritis hasil penelitian terdahulu serta kerangka konseptual tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, maka dapat dikembangkan hipotesa dengan penjelasan sebagai berikut:

H₁: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

H₃ : Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

H₄ : Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat membangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono,2017). Sedangkan menurut Rusiadi (2016) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih sehingga dibangun suatu teori untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian yang langsung mengenai objek penelitian untuk memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk meneliti secara alamiah yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan) untuk mendapatkan data yang sebenarnya (Sugiyono, 2013:1).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2023												Tahun 2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	Pengajuan Judul		■													
2	Penyusunan Proposal			■												
3	Perbaikan Proposal			■	■	■	■	■	■							
4	Seminar Proposal					■										
5	Pengelolaan Data dan Penyusunan Proposal								■	■	■	■	■			
6	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■	■		
7	Seminar Hasil												■			
8	Sidang Meja Hijau															■

Sumber: Penulis (2023)

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Penelitian

3.3.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ialah salah satu cara untuk menentukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dengan merumuskan secara singkat dan jelas serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran.

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang diteliti, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu variabel Transparansi (X_1), variabel Akuntabilitas (X_2) dan variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) dan 1 (Satu) variabel terikat yaitu Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

Tabel 3.2 Tabel Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Transparansi (X ₁)	Keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berwenang (Mahmudi, 2016)	1) Informatif 2) Keterbukaan 3) Pengungkapan (Mardiasmo, 2018)	Rasio
2	Akuntabilitas (X ₂)	Merupakan pertanggung jawaban baik oleh orang-orang ataupun badan-badan yang dipilih atas pilihannya dan tindakan yang akan dikerjakan (Saerang, 2013)	1) Transparansi 2) Kewajiban 3) Dapat dikendalikan 4) Tanggung jawab 5) Tanggapan (Yunita, 2018)	Rasio
3	Partisipasi Masyarakat (X ₃)	Permusyawaratan dalam pembangunan desa, yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan desa yang disebut musrenbang, aspek kontrol dan pengawasan pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa (Hasniati, 2017)	1) Keterlibatan masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa 2) Pengawasan masyarakat untuk pengelolaan keuangan desa 3) Evaluasi hasil pembangunan desa (Ardiyanti, 2019)	Rasio

4	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan (Yuliansyah, 2016)	1) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan ekonomis. 2) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan efektif (Indriyani, 2018)	Rasio
---	-------------------------------	---	--	-------

a. Definisi Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berwenang (Mahmudi, 2016). Sedangkan menurut Nurhayati (2017) transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka secara publik baik bagi masyarakat atau pemerintahan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ritonga (2016) transparansi bukan saja tentang ketersediaan informasi dapat diakses secara publik namun dapat disajikan atau dipublikasikan dengan tepat waktu agar bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan kinerja pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2018:19) transparansi memiliki 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1) Informatif yaitu informasi yang jelas tentang mekanisme, prosedur, data, fakta dan informasi berita secara tepat dan akurat.
- 2) Keterbukaan yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik serta memberikan hak masyarakat umum untuk dapat mengakses data pengelolaan keuangan
- 3) Pengungkapan yaitu pemberitahuan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial.

b. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan perangkat kerja untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk mengetahui proses kinerja pertanggungjawaban tersebut (Setiana, 2017). Sedangkan menurut Saerang (2018) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban baik oleh orang-orang ataupun badan-badan yang dipilih atas pilihannya dan tindakan yang akan dikerjakan.

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Yunita (2018:101) terdapat 5 (lima) indikator akuntabilitas yaitu:

- 1) Transparansi yaitu kemampuan organisasi dalam menyampaikan fakta pertanggungjawaban tentang kinerjanya.
- 2) Kewajiban yaitu kemampuan untuk menangani konsekuensi kinerja.
- 3) Dapat dikendalikan yaitu penyelesaian tugas yang diberikan.
- 4) Tanggung jawab yaitu pertanggungjawaban atas standar kinerja.

5) Tanggapan yaitu memberikan harapan yang sesuai diinginkan berdasarkan kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.

c. Definisi Partisipasi Masyarakat

Menurut Hasniati (2017) partisipasi masyarakat ialah salah satu atas bagian subjek atau permusyawaratan dalam pembangunan desa, yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan desa yang disebut musrenbang, aspek kontrol dan pengawasan pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa. Partisipasi masyarakat bukan saja sebagai penunjang pengambilan keputusan pengelolaan keuangan desa tetapi juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi dalam pengelolaan keuangan desa yang ada. Partisipasi ini dapat meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan desa.

Menurut Ardiyanti (2019) ada 4 (empat) indikator partisipasi masyarakat yaitu:

- 4) Keterlibatan masyarakat yaitu keterlibatan langsung lapisan masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- 5) Pengawasan masyarakat untuk pengelolaan keuangan desa
- 6) Evaluasi hasil pembangunan desa yaitu kritik dan saran yang merupakan salah satu masukan untuk perbaikan agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Definisi pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun unsur dari aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat. (Yuliansyah, 2016).

Menurut Indriyani (2018) terdapat 2 (dua) indikator dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan ekonomis

Pengelolaan anggaran harus di dasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan keseimbangan antara pembiayaan dan pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan pengabdian masyarakat.

4) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan efektif

Pengelolaan anggaran harus dipergunakan dengan sebaik mungkin di susun dengan efektif, efisiensi, tepat serta kualitas yang baik agar kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah suatu kelompok orang atau elemen penelitian, dimana elemen tersebut merupakan unit terkecil yang merupakan sumber data

yang diperlukan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat desa dengan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 400 populasi dan kriteria tertentu.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian unsur dari populasi yang dianggap mewakili karakteristik penelitian, pengambilan sampel harus diperhitungkan dengan benar, sehingga dapat memperoleh sampel yang benar-benar mewakili gambaran populasi sebenarnya.

Dalam penelitian ini peneliti mempersempit populasi yaitu menghitung ukuran sampel, sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat desa Lau Bekeri. Adapun yang dilakukan untuk menghitung ukuran sampel dengan teknik rumus slovin, peneliti menggunakan rumus slovin karena penarikan sampel jumlahnya harus representative dan dapat dilakukan dengan rumus perhitungan yang sederhana.

Rumus slovin untuk menentukan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel atau jumlah sampel

N : Ukuran populasi

e² : Tolerir

Dalam penelitian ini tolerir atau presentasi kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan yang dapat dibulatkan untuk mencapai

kesesuaian. Untuk mengetahui sampel penelitian dengan perhitungan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{400}{1 + 400 (10)^2}$$

$$n = 80$$

Dari hasil perhitungan di atas menggunakan rumus slovin dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 80 responden di desa Lau Beker.

3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan jenis data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Penelitian yang langsung mengenai objek penelitian untuk memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.

3.5.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan penelitian langsung dari sumbernya yaitu kantor desa dan masyarakat Desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang sistematis dan objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan yang bersifat lisan atau tulisan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah

1) Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian yang melakukan pengamatan langsung ke lapangan atau tempat penelitian. Observasi akan dilakukan secara langsung kepada perangkat desa dan masyarakat desa Lau Bekeri kecamatan Kutalimbaru.

2) Kuisoner

Kuisoner merupakan teknik penelitian yang memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain sebagai responden untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan yang diberikan, hal ini akan dilakukan secara bertahap selama 2 (dua) minggu yang ditujukan kepada 6 perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur pemerintahan, kaur umum dan kepala dusun dan masyarakat Desa Lau Bakeri. Penelitian ini menggunakan skala likert yaitu dengan menekankan beberapa bentuk nilai diantaranya:

Tabel 3.3 Skala Likert

Skala Likert	Skor untuk pertanyaan atau pernyataan
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak setuju (TS)	2
Netral (N)	3

Setuju (S)	4
Sangat setuju (SS)	5

Sumber: Penulis (2023)

3.7 Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan salah satu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan metode assosiatif kuantitatif, diharapkan akan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat tentang respon yang diberikan, maka akan terbentuk angka yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

3.7.1 Pengujian Kualitas Data

Sebelum data di analisis dan di evaluasi, terlebih dahulu data tersebut diuji dengan:

a. Uji Validitas

Pengujian ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidak nya suatu kuisioner. Suatu kuisioner yang dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner/angket mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien *rhitung* dengan koefisien *rtabel*. Jika $rhitung > rtabel$ berarti item valid. Sebaliknya jika $rhitung < rtabel$ berarti item tidak valid (Ghozali, 2018:51).

b. Uji Reabilitas

Pengujian dengan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan suatu indikator dari variabel, suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018: 45). Pengukuran reabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Ghozali, 2011:48).

3.7.2 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:206) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis statistik deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis ini dilakukan mengenai pembahasan bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, dengan rumus sebagai berikut:

a. Rata-rata hitung (Mean)

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata hitung (mean) dapat dirumuskan sebagai berikut: Keterangan:

$$x = \frac{\sum x_1}{n}$$

x = Mean (rata-rata)

Σx_i = Jumlah nilai x ke i sampai ke n

n = Jumlah sampel atau banyak data

b. Standar Deviasi

Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, dan seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata- nilai sampel, yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$s = \frac{\sqrt{\Sigma f_1(x^1 - x)^2}}{(n - 1)}$$

Keterangan:

S = Simpang Baku

x_i = Nilai X ke i sampai n

\bar{x} = Rata-rata nilai

n = Jumlah sampel

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Adapun jenis-jenis asumsi klasik adalah sebagai berikut.

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid

untuk jumlah sampel kecil. Ada 2 (dua) cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau analisis statistik (Ghozali. 2018:145).

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali, (2018:71) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi sebagai berikut:

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam arti sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1 / \text{tolerance}$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Misalnya nilai $\text{tolerance}=0,10$ sama dengan tingkat kolonieritas $0,95$. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF tetapi

masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2017:137).

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (Multiple Linear Regression). Untuk membuktikan hipotesis digunakan alat uji statistik regresi linier berganda, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y: Pengelolaan Keuangan Desa

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Variabel Tingkat Transparansi

β_2 : Koefisien Regresi Variabel Tingkat Akuntabilitas

β_3 : Koefisien Regresi Variabel Partisipasi Masyarakat

X_1 : Transparansi

X_2 : Akuntabilitas

X_3 : Partisipasi Masyarakat

e : Error

3.7.5 Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (t)

Uji parsial (t) ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat pengaruh 0,05 ($\alpha = 5\%$). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan signifikan dengan ketentuan:

Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika nilai signifikan $t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (F)

Uji simultan (F) bertujuan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_A diterima. Menggunakan signifikan level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_A diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu, (Ghozali, 2018). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Lau Bekeri yang beralamat di jalan glugur rimbum desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Sejarah singkat desa Lau Bekeri yang merupakan salah satu desa di kecamatan Kutalimbaru, berdasarkan data Badan Pusat Statistik jarak antara kantor desa dengan kantor kecamatan sejauh 15 km dengan luas wilayah 7,30 km² yang terdiri dari 14 desa. secara geografis desa Lau Bekeri berada pada 3^o47' lintang utara dan 9^o52' bujur timur.

Pada masa pemerintahan Belanda desa Lau Bekeri yang merupakan salah satu desa di kecamatan Kutalimbaru yang pada zaman dahulu daerah ini bernama Hofd Perbapaan yang tunduk terhadap daerah yang bernama Cotoeleur Van Boven yang sekarang wilayah tersebut bernama Pancur Batu. Wilayah kecamatan Kutalimbaru dahulunya terdiri dari 6 perbaan dan dijabat oleh Tangkas Sinulingga dan terdapat 80 kepenghuluan. Sedangkan pada zaman pemerintahan Jepang tahun 1942-1945 kecamatan Kutalimbaru terdiri dari 80 Komico dan tunduk pada daerah Guntebu yang dijabat oleh Bunsinco, dan pada masa pemerintahan Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan sekarang kecamatan Kutalimbaru membawahi 80 kepenghuluan yang tunduk kepada daerah Kewedanaan Deli Hulu yang berkedudukan di Pancur Batu

Pada zaman pemerintahan Negara Sumatera Timur tahun 1948 kecamatan Kutalimbaru berubah menjadi daerah Onder Hofd yang berada dibawah pemerintahan Distrik Hofd di Pancur Batu yang dipimpin oleh Negeri purba dan kepemimpinan ini berlangsung sampai 29 Desember 1949. Pada pemerintahan Kesatuan tahun 1950 kecamatan Kutalimbaru dijabat oleh Kelang Sinulingga dan kewedanaan di Pancur Batu yang dijabat oleh Keras Surbakti terus berlangsung penghapusan wilayah kewedanaan Deli Hulu pada tahun 1957, setelah itu status pemerintahan kembali menjadi kecamatan kutalimbaru dengan ibu kota kecamatan yang berada di desa Kutalimbaru.

Berikut 14 desa yang berkedudukan di kecamatan Kutalimbaru:

1. Suka Makmur
2. Perpanden
3. Namo Mirik
4. Suka Dame
5. Kwala Lau Bicik
6. Pasar X
7. Sampe Cita
8. Kutalimbaru
9. Suka Rende
10. Lau Bekeri
11. Silebo-Lebo
12. Sawit Rejo
13. Sei Mencirim
14. Namo Rube Julu

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2022 jumlah dusun di desa Lau Bekeri sebanyak 10 dusun dengan jumlah penduduk 4268 jiwa, kepadatan penduduk 584,66/km² dan jumlah penduduk terbanyak pada desa Sei Mencirim sebanyak 5.798 jiwa dengan kepadatan penduduk 917,14/km² sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu pada desa Kwala Lau Bicik dengan jumlah penduduk 1.261 jiwa dengan kepadatan penduduk 150,12/km², pada desa Lau bekeri jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.167 jiwa dan jenis perempuan berjumlah 2.101 jiwa.

Visi dan Misi Pemerintah desa Lau Bekeri Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Visi dan Misi desa Lau Bekeri adalah gambaran otentik tentang apa aja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Lau Bekeri dalam 6 (enam) tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih pada periode 2023-2028.

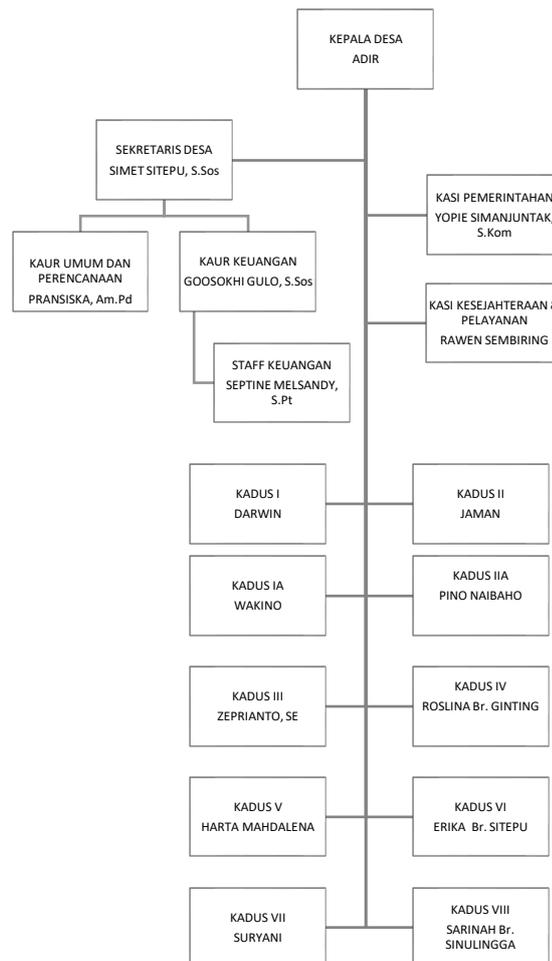
Visi : Bersama mewujudkan pembangunan Desa Lau Bekeri yang partisipatif, berkeadilan, maju dan berbudaya.

Misi :

- 1) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan roda pemerintahan maupun dalam mengayomi masyarakat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Government*).
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- 3) Pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu: cepat, tepat dan benar
- 4) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

- 5) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi: Pemberdayaan Sumber Dya Manusia (SDM), Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA), dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Struktur organisasi Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:



Sumber: Kantor Desa Lau Bekeri

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Lau Bekeri



Sumber : <https://kualimbaru.deliserdangkab.go.id>

Gambar 4.2 Lambang Kabupaten Deli Serdang

Makna Lambang Kabupaten Deli Serdang:

1. Bintang bersudut 5 melambangkan keTuhanan Yang Maha Esa berfalsafat pancasila.
2. Ada 17 kuntum bunga, 5 daun sirih, 3 buah pinang, 45 butir padi melambangkan catatan sejarah, tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia dimana rakyat Deli Serdang turut memberi dharma bhakti dalam kemerdekaan republik Indonesia.
3. Ada padi berbuah 11 butir dan seekor ikan yang melambangkan penduduk kabupaten Deli Serdang sebagian besar terdiri dari petani dan nelayan.
4. Gunung menunjukkan geografi Deli Serdang yang terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan pantai.
5. Ada 5 gelombang ombak yang melambangkan Deli Serdang di airi oleh sungai-sungai yang membawa kemakmuran.
6. Matahari terbit yang sedang naik melambangkan masa depan yang gemilang, cita-cita yang tinggi serta kesemangatan bekerja dan penuh keyakinan.

7. Pohon kelapa sawit, karet, tembakau melambangkan daerah Deli Serdang adalah daerah perkebunan yang menghasilkan devisa.
8. Roda mesin bergerigi melambangkan cita-cita modernisasi dari mekanisme kehidupan rakyat dan lambang kerajinan tangan
9. Sirih, pinang dan puan melambangkan kebudayaan asli dimana sirih dan pinang merupakan alat pembuka kata dalam segala upacara serta lambang persaudaraan dan toleransi.
10. Ada 5 helai daun sirih yang melambangkan 3 hukum yang dijunjung tinggi yaitu hukum politik, hukum adat dan hukum negara.

4.1.2 Hasil Analisis Data

4.1.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini ialah perangkat desa pada desa Lau Bekeri dan masyarakat yang menetap di desa Lau Bekeri. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari kuisioner yang dibagikan kepada responden yang berjumlah 80 responden di desa Lau Bekeri dan melakukan observasi, wawancara sebagai pelengkap. Pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat desa Lau Bekeri sebagai sampel penelitian. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian pada desa Lau Bekeri diuraikan mengenai tingkat pengembalian kuisioner.

Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner

No	Tempat Penelitian	Sebar	Kembali		Tidak Kembali	Total
			Baik	Rusak		
1	Desa Lau Bekeri	90	80	0	10	80

Sumber : Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, umur responden dan pendidikan terakhir. Berikut kriteria responden desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru:

Tabel 4.2 Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	45	56.3
2	Perempuan	35	43.7
Total		80	100%

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4,2 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki, hal ini dapat dilihat bahwa 56,3% responden berjenis kelamin laki-laki dan 43,7% berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.3 Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	20	25
2	31-50	35	43.8
3	51-60	25	31.2
Total		80	100%

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan umur responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berumur 31-51 tahun, hal ini dapat dilihat bahwa 25% responden

berusia 20-30 tahun, 43.8% responden berusia 31-50 tahun dan 31,2% responden berusia 31,2%.

Tabel 4.4 Status Responden

No	Status Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum menikah	32	40
2	Menikah	48	60
Total		80	100%

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan status responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang sudah menikah, hal ini dapat dilihat bahwa 60% responden sudah menikah, dan 40% responden belum menikah.

Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	13	16.2
2	SMP	15	18.8
3	SMA/Sederajat	48	60
4	D1-D3	2	2.5
5	S1-S3	2	2.5
Total		80	100%

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan umur responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berumur 31-51 tahun, hal ini dapat dilihat bahwa 16,2 responden berpendidikan terakhir SD, 18,8% responden berpendidikan terakhir SMP, 60% responden berpendidikan terakhir SMA, 2,5% responden

berpendidikan terakhir D1-D3 dan 2,5% responden berpendidikan terakhir S1-S3.

Tabel 4.6 Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	35	43.75
2	Guru	3	3.75
3	Karyawan Swasta	10	12.5
4	Wiraswasta	12	15
5	Pegawai Tetap	5	6.25
6	Lainnya	15	18.75
Total		80	100%

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan pekerjaan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang bekerja sebagai petani, hal ini dapat dilihat bahwa 43,75% responden bekerja sebagai petani, 3,75% responden bekerja sebagai guru, 12,5% bekerja sebagai karyawan swasta, 15% responden bekerja sebagai wiraswasta, 6,25% responden bekerja sebagai pegawai tetap dan 18,75% responden bekerja sebagai pekerja lainnya.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel bebas yaitu Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), Partisipasi Masyarakat (X_3) dan 1 variabel terikat yaitu Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Dalam penyebaran kuisioner masing-masing variabel memiliki 7 butir pernyataan yang akan

diisi oleh 80 responden, skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert.

Berikut ini adalah frekuensi hasil pengambilan data dari setiap pernyataan yang ada pada setiap variabel.

a. Variabel Transparansi (X_1)

Tabel 4.7 Penilaian Responden Terhadap Variabel (X_1)

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1												
X1.1	2	2.5	23	28.75	44	55	11	13.75	0	0	80	100
X1.2	16	20	43	53.75	21	26.25	0	0	0	0	80	100
X1.3	4	5	46	57.5	30	37.5	0	0	0	0	80	100
X1.4	12	15	41	51.25	26	32.5	1	1.25	0	0	80	100
X1.5	7	8.75	52	65	21	26.25	0	0	0	0	80	100
X1.6	16	20	53	66.25	11	13.75	0	0	0	0	80	100
X1.7	2	2.5	39	48.75	32	40	7	8.75	0	0	80	100

Berdasarkan tabel 4.7 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dari 80 responden pada pernyataan 1 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2 responden (2,5%), sebanyak 23 responden (28.75%) menyatakan setuju sebanyak 44 responden (55%) menyatakan netral, sebanyak 11 responden (13,75%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden netral seanyak 44

responden dengan persentase 55%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel transparansi (X_1) yang mencerminkan responden secara netral untuk adanya keterbukaan informasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

- 2) Dari 80 responden pada pernyataan 2 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 16 responden (20%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 43 responden (53,75%) menyatakan setuju, sebanyak 21 responden (26,25%) menyatakan netral. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 43 responden dengan persentase 53,75%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel transparansi (X_1) pada pernyataan 2 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk adanya akses terhadap informasi mengenai rencana penggunaan keuangan desa.
- 3) Dari 80 responden pada pernyataan 3 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 4 responden (5%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 46 responden (57,5%) menyatakan setuju, sebanyak 30 responden (37,5%) menyatakan netral. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 46 responden dengan persentase 57,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel transparansi (X_1) pada pernyataan 3 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk adanya musyawarah rencana penggunaan keuangan desa
- 4) Dari 80 responden pada pernyataan 4 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 12 responden (15%) menyatakan sangat setuju sebanyak 41 responden

(51,25%) menyatakan setuju, sebanyak 26 responden (32,5%) menyatakan netral, sebanyak 1 responden (1,25%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 41 responden dengan persentase 51,25%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel transparansi (X_1) pada pernyataan 4 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk Penyediaan informasi yang bertanggung jawab.

- 5) Dari 80 responden pada pernyataan 5 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7 responden (8,75%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 52 responden (65%) menyatakan setuju, sebanyak 21 responden (26,25%) menyatakan netral. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 52 responden dengan persentase 65%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel transparansi (X_1) pada pernyataan 5 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan pembangunan desa.
- 6) Dari 80 responden pada pernyataan 6 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 16 responden (20%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 53 responden (66,25%) menyatakan setuju, sebanyak 11 responden (13,75%) menyatakan netral. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 53 responden dengan persentase 66,25%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel transparansi (X_1) pada pernyataan 6 yang

mencerminkan responden menyatakan setuju untuk Adanya kerjasama dengan media masa dan lembaga pemerintahan dalam peningkatan informasi.

- 7) Dari 80 responden pada pernyataan 7 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2 responden (2,5%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 39 responden (48,75%) menyatakan setuju, sebanyak 32 responden (40%) menyatakan netral, dan sebanyak 7 responden (8,75%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 39 responden dengan persentase 48,75%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel transparansi (X_1) pada pernyataan 7 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk kantor desa selalu menyediakan papan informasi yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa.

b. Variabel Akuntabilitas (X_2)

Tabel 4.8 penilaian Responden Terhadap Variabel (X_2)

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1												
X1.1	54	67.5	12	15	3	3.75	1	1.25	10	12.5	80	100
X1.2	12	15	44	55	12	15	8	10	4	5	80	100
X1.3	13	16.25	52	65	10	12.5	5	6.25	0	0	80	100
X1.4	12	15	43	53.75	14	17.5	10	12.5	1	1.25	80	100
X1.5	11	13.75	54	67.5	9	11.25	4	5	2	2.25	80	100

X1.6	14	17.5	52	65	11	13.75	3	3.75	0	0	80	100
X1.7	16	20	54	67.5	7	8.75	3	3.75	0	0	80	100

Berdasarkan tabel 4.8 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dari 80 responden pada pernyataan 1 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 54 responden (67,5%) menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden (15%) menyatakan setuju, sebanyak 3 responden (3,75%) menyatakan netral, sebanyak 1 responden (1,25%) menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 10 responden (12,5%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju sebanyak 54 responden dengan persentase 67,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Akuntabilitas (X_2) pada pernyataan 1 yang mencerminkan responden menyatakan sangat setuju untuk penyusunan anggaran pemerintah desa (PEMDES) dilakukan sesuai prinsi-prinsip anggaran.
- 2) Dari 80 responden pada pernyataan 2 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 12 responden (15%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 44 responden (55%) menyatakan setuju, sebanyak 12 responden (15%) menyatakan netral, sebanyak 8 responden (10%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 4 responden (5%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 44 responden dengan persentase 55%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Akuntabilitas (X_2) pada pernyataan 2 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk

sumber-sumber penggunaan dana pada pemerintah desa (PEMDES) telah diketahui oleh pemangku kepentingan selaku pengguna laporan keuangan.

- 3) Dari 80 responden pada pernyataan 3 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 13 responden (16,25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 52 responden (65%) menyatakan setuju, sebanyak 10 responden (2,5%) menyatakan netral, sebanyak 5 responden (6,25%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 44 responden dengan persentase 55%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Akuntabilitas (X_2) pada pernyataan 3 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk Pemerintah desa (PEMDES) telah memiliki kesesuaian antara target dengan pencapaian kegiatan atau program yang dilakukan
- 4) Dari 80 responden pada pernyataan 2 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 12 responden (15%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 43 responden (53,75%) menyatakan setuju, sebanyak 14 responden (17,5%) menyatakan netral, sebanyak 10 responden (12,5%) menyatakan tidak setuju pada dan sebanyak 1 responden (1,25%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 43 responden dengan persentase 53,75%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Akuntabilitas (X_2) pada pernyataan 4 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk adanya Pengawasan tim pelaksana terhadap penggunaan keuangan desa.

- 5) Dari 80 responden pada pernyataan 5 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11 responden (13,75%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 54 responden (67,5%) menyatakan setuju, sebanyak 9 responden (11,25%) menyatakan netral, sebanyak 4 responden (5%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 2 responden (2,25%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 54 responden dengan persentase 67,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Akuntabilitas (X_2) pada pernyataan 5 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk adanya laporan mengenai rincian dan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat.
- 6) Dari 80 responden pada pernyataan 6 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 14 responden (17,5%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 52 responden (65%) menyatakan setuju, sebanyak 11 responden (13,75%) menyatakan netral, sebanyak 3 responden (3,75%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 52 responden dengan persentase 65%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Akuntabilitas (X_2) pada pernyataan 6 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan, pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan keuangan desa.
- 7) Dari 80 responden pada pernyataan 7 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 16 responden (20%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 54 responden

(67,5%) menyatakan setuju, sebanyak 7 responden (8,75%) menyatakan netral 3, sebanyak 3 responden (3,75%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 54 responden dengan persentase 67,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Akuntabilitas (X_2) pada pernyataan 7 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk penyajian laporan disajikan secara tertulis dan tepat waktu dan dapat dipahami.

c. Variabel Partisipasi Masyarakat (X_3)

Tabel 4.9 penilaian Responden Terhadap Variabel (X_3)

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1												
X1.1	18	22.5	50	62.5	10	12.5	2	2.5	0	0	80	100
X1.2	16	20	43	53.75	18	22.5	3	3.75	0	0	80	100
X1.3	5	6.25	44	55	22	27.5	8	10	1	1.25	80	100
X1.4	14	17.5	49	61.25	10	12.5	6	7.5	1	1.25	80	100
X1.5	17	21.25	51	63.75	9	11.25	2	2.5	1	1.25	80	100
X1.6	20	25	47	58.75	10	12.5	3	3.75	0	0	80	100
X1.7	13	16.25	58	72.5	7	8.75	2	2.5	0	0	80	100

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dari 80 responden pada pernyataan 1 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 18 responden (22,5%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 50 responden (62,5%) menyatakan setuju, sebanyak 10 responden (12,5%) menyatakan netral, sebanyak 2 responden (2,5%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 50 responden dengan persentase 62,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) pada pernyataan 1 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk dalam penyusunan arah dan kebijakan umum keunagan desa selalu melibatkan masyarakat.
- 2) Dari 80 responden pada pernyataan 2 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 16 responden (20%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 43 responden (53,75%) menyatakan setuju, sebanyak 18 responden (22,5%) menyatakan netral, sebanyak 3 responden (3,75%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 43 responden dengan persentase 53,75%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) pada pernyataan 2 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk Ketersediaan masyarakat dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan.
- 3) Dari 80 responden pada pernyataan 3 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 5 responden (6,25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 44 responden (55%) menyatakan setuju, sebanyak 22 responden (27,5%) menyatakan netral, sebanyak 8 responden (10%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak

1 responden (1,25%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 44 responden dengan persentase 55%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) pada pernyataan 3 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk ketersediaan masyarakat untuk meberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan.

4) Dari 80 responden pada pernyataan 4 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 4 responden (17,5%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 49 responden (61,25%) menyatakan setuju, sebanyak 10 responden (12,5%) menyatakan netral, sebanyak 6 responden (7,5%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 1 responden (1,25%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 49 responden dengan persentase 61,25%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) pada pernyataan 4 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk ketersediaan masyarakat dalam melestarikan hasil pembangunan.

5) Dari 80 responden pada pernyataan 5 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 17 responden (21,25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 51 responden (63,75%) menyatakan setuju, sebanyak 9 responden (11,5%) menyatakan netral, sebanyak 2 responden (2,5%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 1 responden (1,25%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 51 responden dengan persentase 63,75%, hal

ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) pada pernyataan 5 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk pemberian kritik dan saran dari masyarakat.

- 6) Dari 80 responden pada pernyataan 6 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 20 responden (25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 47 responden (58,75%) menyatakan setuju, sebanyak 10 responden (12,5%) menyatakan netral, sebanyak 3 responden (3,75%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 47 responden dengan persentase 58,75%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) pada pernyataan 6 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan.
- 7) Dari 80 responden pada pernyataan 7 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 13 responden (16,25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 58 responden (72,5%) menyatakan setuju, sebanyak 7 responden (8,75%) menyatakan netral, sebanyak 2 responden (2,5%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 58 responden dengan persentase 72,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) pada pernyataan 7 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk masyarakat selalu dilibatkan dalam kepentingan perencanaan keuangan desa.

d. Variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Tabel 4.10 Penilaian Responden Terhadap Variabel (Y)

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1												
X1.1	17	21.25	57	71.25	5	6.25	1	1.25	0	0	80	100
X1.2	13	16.25	38	47.5	23	28.75	4	5	2	2.5	80	100
X1.3	19	23.75	40	50	16	20	5	6.25	0	0	80	100
X1.4	17	21.25	46	57.5	16	20	1	1.25	0	0	80	100
X1.5	21	26.5	36	45	19	23.75	3	3.75	1	1.25	80	100
X1.6	19	23.75	42	52.5	16	20	3	3.75	0	0	80	100
X1.7	17	21.25	44	55	15	18.75	4	5	0	0	80	100

Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dari 80 responden pada pernyataan 1 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 17 responden (21,25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 57 responden (71,25%) menyatakan setuju, sebanyak 5 responden (6,25%) menyatakan netral, sebanyak 1 responden (1,25%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 57 responden dengan persentase 71,25%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada pernyataan 1 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 2) Dari 80 responden pada pernyataan 2 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 13 responden (16,25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 38 responden (47,5%) menyatakan setuju, sebanyak 23 responden (28,75%) menyatakan netral, sebanyak 4 responden (5%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 2 responden (2,5%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 38 responden dengan persentase 47,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada pernyataan 2 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk penyusunan dan penyerahan laporan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu.
- 3) Dari 80 responden pada pernyataan 3 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 19 responden (23,75%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 40 responden (50%) menyatakan setuju, sebanyak 16 responden (20%) menyatakan netral, sebanyak 5 responden (6,25%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 40 responden dengan persentase 50%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada pernyataan 3 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis, menghindari pengeluaran boros dan tidak produktif.
- 4) Dari 80 responden pada pernyataan 4 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 17 responden (21,25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 46

responden (57,5%) menyatakan setuju, sebanyak 16 responden (20%) menyatakan netral, sebanyak 1 responden (1,25%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 46 responden dengan persentase 57,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada pernyataan 4 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk pengelolaan anggaran dilakukan secara merata tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu.

- 5) Dari 80 responden pada pernyataan 5 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 21 responden (26,5%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 36 responden (45%) menyatakan setuju, sebanyak 19 responden (23,75%) menyatakan netral, sebanyak 3 responden (3,75%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 4 dan sebanyak 1 responden (1,25%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 36 responden dengan persentase 45%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada pernyataan 5 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien untuk mencapai kesejahteraan desa.
- 6) Dari 80 responden pada pernyataan 6 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 19 responden (23,75%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 42 responden (52,5%) menyatakan setuju, sebanyak 16 responden (20%) menyatakan netral, sebanyak 3 responden (3,75%) menyatakan tidak

setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 42 responden dengan persentase 52,5%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada pernyataan 6 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk dalam laporan keuangan desa tidak terdapat dana SILA > 30% yang merupakan suatu indikasi penggunaan dana desa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

- 7) Dari 80 responden pada pernyataan 7 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 17 responden (21,25%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 44 responden (55%) menyatakan setuju, sebanyak 15 responden (18,75%) menyatakan netral, sebanyak 4 responden (5%) menyatakan tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa jawaban responden kecenderungan sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 44 responden dengan persentase 55%, hal ini dapat diartikan bahwa indikator dalam variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada pernyataan 7 yang mencerminkan responden menyatakan setuju untuk laporan keuangan dapat dipahami dan terinci.

4.1.4 Uji Instrumen Penelitian

a. Pengujian Validitas Data

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir pernyataan kuisioner yang telah diberikan kepada responden maka perlu dilakukan uji validitas.

Validitas disetiap pernyataan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,219 maka butir pernyataan dianggap valid.

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Data

Variabel	Pernyataan	rhitung	rtabel	Keputusan
Transparansi (X ₁)	Butir 1	0,601	0,219	Valid
	Butir 2	0,632	0,219	Valid
	Butir 3	0,687	0,219	Valid
	Butir 4	0,504	0,219	Valid
	Butir 5	0,518	0,219	Valid
	Butir 6	0,429	0,219	Valid
	Butir 7	0,594	0,219	Valid
Akuntabilitas (X ₂)	Butir 1	0,645	0,219	Valid
	Butir 2	0,533	0,219	Valid
	Butir 3	0,493	0,219	Valid
	Butir 4	0,398	0,219	Valid
	Butir 5	0,747	0,219	Valid
	Butir 6	0,451	0,219	Valid
	Butir 7	0,633	0,219	Valid
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	Butir 1	0,561	0,219	Valid
	Butir 2	0,617	0,219	Valid
	Butir 3	0,510	0,219	Valid
	Butir 4	0,543	0,219	Valid
	Butir 5	0,550	0,219	Valid
	Butir 6	0,55	0,219	Valid
	Butir 7	0,619	0,219	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Butir 1	0,413	0,219	Valid
	Butir 2	0,561	0,219	Valid
	Butir 3	0,418	0,219	Valid
	Butir 4	0,434	0,219	Valid
	Butir 5	0,734	0,219	Valid
	Butir 6	0,579	0,219	Valid
	Butir 7	0,760	0,219	Valid

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada tabel 4.11 maka dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan pada variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y dikatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11 bahwa masing-masing butir pernyataan r hitung $>$ dari pada r tabel.

b. Pengujian reabilitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir pernyataan yang diberikan kepada responden, maka perlu dilakukan uji reabilitas. Butir pernyataan dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban responden adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuisioner *reliable* atau tidak menggunakan *alpha cronbcah's*. kuisioner dikatakan *reliable* apabila *alpha cronbcah's* $>$ 0,60 dan tidak *reliable* apabila sama dengan $=$ atau $<$ 0,60.

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Reabilitas

Variabel	<i>alpha cronbcah's</i>	Keputusan
Transparansi (X_1)	0,645	<i>Reliable/Konsisten</i>
Akuntabilitas (X_2)	0,609	<i>Reliable/Konsisten</i>
Partisipasi Masyarakat (X_3)	0,634	<i>Reliable/Konsisten</i>
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,638	<i>Reliable/Konsisten</i>

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada tabel 4.10 maka dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan pada variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y dikatakan *reliable/konsisten*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.12 bahwa masing-masing butir pernyataan *reliable/konsisten* karena *alpha cronbcah's* $>$ 0,60.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa uji regresi linier berganda layak atau tidak untuk digunakan. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi maka alat uji statistik regresi linier berganda dapat digunakan.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji model regresi, apakah variabel residual berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik terdistribusi dan normal atau mendekati data normal. Pengujian normalitas data dilakukan berdasarkan uji statistik nonparametric *Kolmogorov Smirnov* (K-S), dasar pengambilan keputusan untuk *Kolmogorov Smirnov* (K-S) yaitu jika nilai signifikan $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal dan sebaliknya.

Tabel 4.13 Hasil Pengujian *Kolmogorov Smirnov* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,09781768
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,052
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

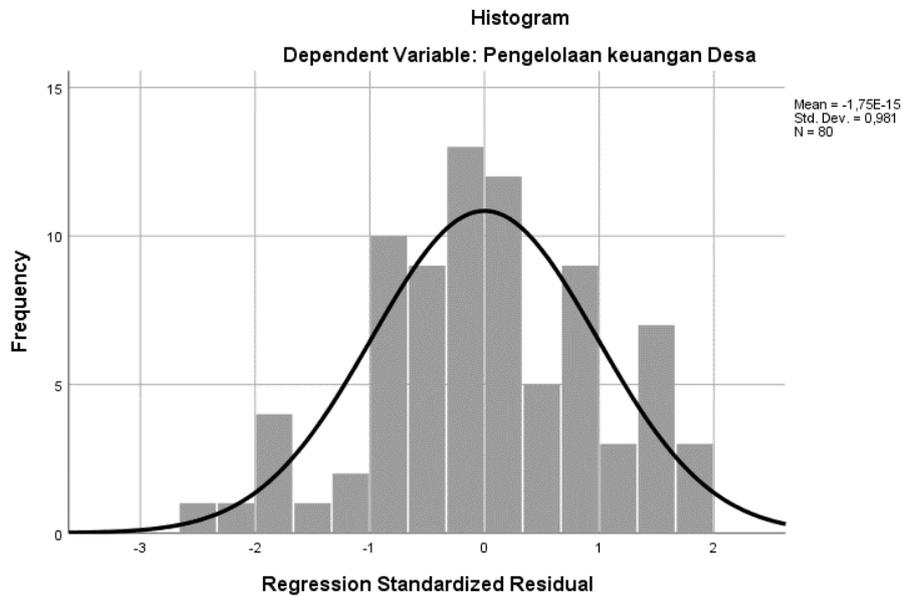
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

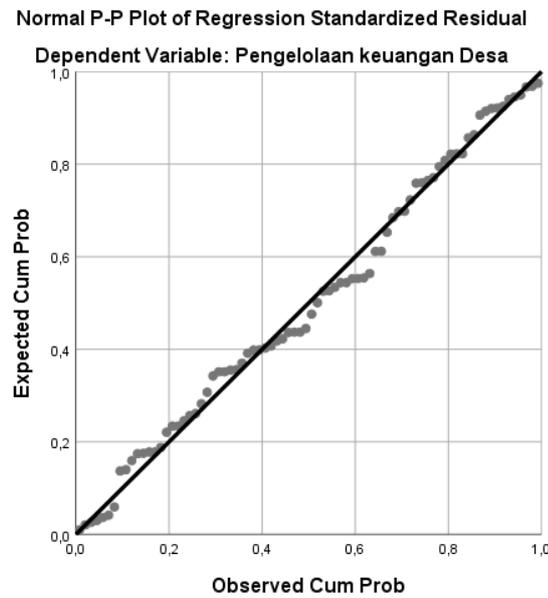
Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan angka *Asymp.sig (2 tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistrsibusi normal.



Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Gambar 4.3 Histogram

Berdasarkan gambar 4.3 diatas, maka dapat disimpulkan hasil pengelolaan uji normalitas diketahui bahwa berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis berbentuk lonceng yang berkesinambungan.



Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Gambar 4.4 Normal P.P Plot

Berdasarkan gambar 4.4 diatas, maka dapat disimpulkan hasil pengelolaan uji normalitas dengan menggunakan gambar Normal P.P Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada disekitar garis diagonal sehingga data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS apabila nilai *tolerance* > 10 maka disimpulkan ini terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas dari hasil kuisioner yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

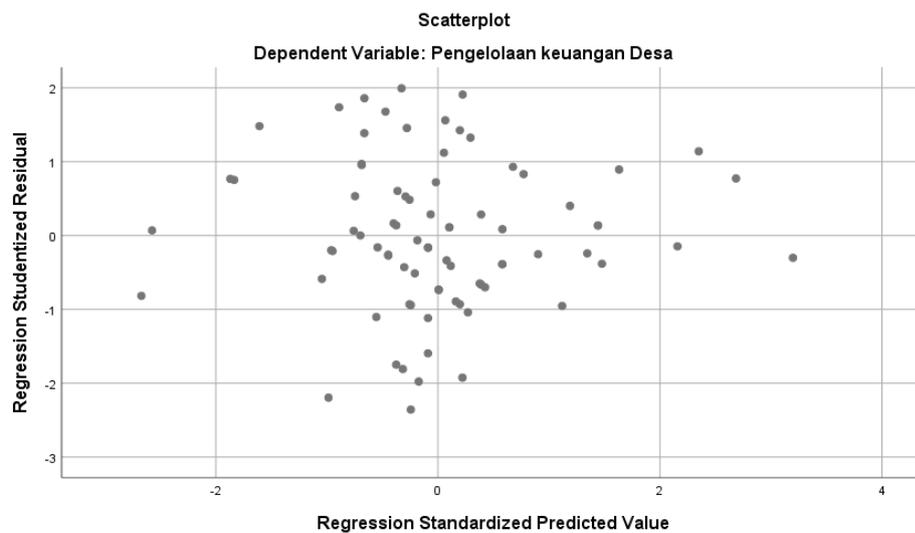
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10,037	3,238		3,100	,003		
Transparansi	-,211	,095	-,178	-2,212	,030	,967	1,034
Akuntabilitas	,501	,096	,501	5,204	,000	,674	1,485
Partisipasi Masyarakat	,343	,101	,325	3,401	,001	,685	1,461

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan Desa
 Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat disimpulkan angka *variance Inflation Factor* (*VIF*) < 10 antara lain variabel Transparansi (X_1) $1,034 < 10$, variabel Akuntabilitas (X_2) $1.485 < 10$, variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) $1,461 < 10$, dan nilai *tolerance* variabel Transparansi (X_1) $0,967 > 0,10$, nilai *tolerance* variabel Akuntabilitas (X_2) $0,674 > 0,10$ dan variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) $0,685 > 0,10$ sehingga terlepas dari multikolineritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians residual* dari suatu pengamatan, dikatakan terdistribusi normal apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat tidak adanya pola tertentu pada *scatterplot*. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Gambar 4.5 Uji Heterokedasitas

Berdasarkan gambar 4.5 diatas maka dapat disimpulkan bahwa gambar *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau garis tertentu, gambar diatas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada disekitar titik 0. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heterokedasitas dengan perkataan lain variabel yang di uji dalam penelitian ini bersifat homokedasitas.

4.1.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Pada pengujian analisis regresi linier berganda variabel independen (variabel X) yang diperhitungkan pengaruhnya terhadap variabel independen (variabel Y) jumlahnya lebih dari satu. Dalam penelitian ini variabel independen adalah Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), Partisipasi Masyarakat (X_3) dan Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Regresi linier berganda dikatakan baik jika memenuhi kriteria, analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Rumus analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	10,037	3,238		3,100	,003		
	Transparansi	-,211	,095	-,178	-2,212	,030	,967	1,034
	Akuntabilitas	,501	,096	,501	5,204	,000	,674	1,485
	Partisipasi Masyarakat	,343	,101	,325	3,401	,001	,685	1,461

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan Desa
 Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.15 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 10,037 - 0,211 + 0,501 + 0,343 + e$$

Persamaan berikut bermakna:

a. Nilai Konstanta : 10,037

Yang memiliki arti yang menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) dalam kualitas

Pengelolaan Keuangan Desa (Y) = 0 ataupun tidak naik atau turun, maka pengelolaan keuangan desa (Y) dinilai sebesar 10,037 kali.

b. **Transparansi (X1)**

Yang memiliki arti nilai koefisien regresinya negatif yakni -0,211 yang artinya jika terjadi penurunan pada variabel transparansi sebanyak 1% maka kualitas pengelolaan keuangan desa juga menurun sebesar -0,211.

c. **Akuntabilitas (X2)**

Yang memiliki arti nilai koefisien regresinya positif yakni 0,501 yang artinya jika terjadi peningkatan pada variabel akuntabilitas sebanyak 1% maka kualitas pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat sebesar 0,501.

d. **Partisipasi Masyarakat (X3)**

Yang memiliki arti nilai koefisien regresinya positif yakni 0,343 yang artinya jika terjadi peningkatan pada variabel partisipasi masyarakat sebanyak 1% maka kualitas pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat sebesar 0,343.

4.1.7 Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,725 ^a	,525	,506	2,139

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan Desa

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa angka *adjusted R square* 0,506 yang disebut koefisien determinasi berarti 50,6% maka dapat diartikan kemampuan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa sebesar 0,506 atau 50,6%. Sedangkan sisanya 100%-50,6% = 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara konstan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikan, menjelaskan pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	10,037	3,238		3,100	,003		
	Transparansi	-,211	,095	-,178	-2,212	,030	,967	1,034
	Akuntabilitas	,501	,096	,501	5,204	,000	,674	1,485
	Partisipasi Masyarakat	,343	,101	,325	3,401	,001	,685	1,461

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan Desa
Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS Versi 23 (2023)

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan

Jika H_a diterima dan H_o ditolak apabila $thitung > ttabel$ atau $Sig\ t < \alpha$.

Jika H_a ditolak dan H_o diterima apabila $thitung < ttabel$ atau $Sig\ t > \alpha$.

Drai hasil tabel 4.17

diatas *thitung* sebesar $-2,212 < 1,664$ sedangkan signifikan $0,030 < 0,05$ maka *Ha* diterima dan *Ho* ditolak, yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

- 2) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan

Jika *Ha* diterima dan *Ho* ditolak apabila $thitung > ttabel$ atau $Sig t < \alpha$.

Jika *Ha* ditolak dan *Ho* diterima apabila $thitung < ttabel$ atau $Sig t > \alpha$

Dari hasil penelitian diatas *thitung* sebesar $5,204 > 1,664$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka *Ha* diterima dan *Ho* ditolak, yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

- 3) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan

Jika *Ha* diterima dan *Ho* ditolak apabila $thitung > ttabel$ atau $Sig t < \alpha$.

Jika *Ha* ditolak dan *Ho* diterima apabila $thitung < ttabel$ atau $Sig t > \alpha$

Dari hasil penelitian diatas *thitung* sebesar $3,401 > 1,664$ dengan signifikan $0,001 < 0,05$ maka *Ha* diterima dan *Ho* ditolak, yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

4.1.8 Uji signifikan Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara serempak, cara yang digunakan dengan melihat

level signature (0,05). Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka *Ha* diterima maka *Ho* ditolak.

Tabel 4.18 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	384,221	3	128,074	27,997	,000 ^b
	Residual	347,666	76	4,575		
	Total	731,888	79			

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa *Fhitung* sebesar 27,997 sedangkan *Fhitung* tabel sebesar 2,72 yang dapat dilihat pada $\alpha=0,05$, sedangkan nilai signifikan yang tertera pada tabel sebesar 0,000 sehingga dapat dijelaskan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan keuangan Desa.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh transparansi (X_1) terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Hasil uji t pada variabel transparansi (X_1) signifikan $0,030 < 0,05$ maka *Ha* diterima dan *Ho* ditolak, yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Matia Andriani (2018) yang berjudul pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa) dalam penelitian Variabel transparansi (X_1) tersebut menunjukkan hasil uji t *Ha* diterima dan *Ho* di tolak sehingga hasil penelitian

transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga di dukung dari penelitian sebelumnya dari penelitian Wahyu Aditya (2022) yang berjudul analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi amsyarakat terhadap alokasi dana desa di kelurahan sekecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil uji t *Ha* diterima dan *Ho* di tolak sehingga hasil penelitian transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan

Menurut Mahmudi (2016) transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan apabila dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat umum sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya baik secara formal maupun inbahwa prinsiparkan penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Transparansi merupakan bagian yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan dana desa, dengan adanya transparansi ini dapat diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar serta lengkap tanpa membiarkan adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan

pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan teori keagenan digunakan untuk mengawasi serta mengontrol aliran dana desa yang didapat dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh pemerintah desa (Halim, 2014) berpendapat bahwa kasus keagenan pada pemerintah wilayah berlangsung secara terus menerus serta saling terkait dalam seluruh proses pelaporan dan pertanggungjawaban wewenang.

2. Pengaruh Akuntabilitas (X_2) terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil penelitian diatas *thitung* sebesar $5,204 > 1664$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka *Ha* diterima dan *Ho* ditolak, yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Matia Andriani (2018) yang berjudul pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa) dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil uji t *Ha* diterima dan *Ho* di tolak sehingga hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan.

Penelitian ini juga di dukung dari penelitian sebelumnya dari penelitian Andika Subandra (2022) yang berjudul pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi amsyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Pebenaan kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penelitian variabel Akuntabilitas (X_2) tersebut menunjukkan hasil uji t *Ha* diterima dan *Ho* di tolak sehingga hasil penelitian akuntabilitas

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifkayanti Amrullah (2019) hasil penelitiannya untuk akuntabilitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan desa.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas ialah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang merupakan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas dan tepat kepada masyarakat umum maka setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ABPDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dari tahap perencanaan sampai teknis administrasinya jadi disetiap kegiatan yang didanai desa harus dilengkapi papan informasi baik manual ataupun digital.

Dalam praktiknya akuntabilitas dicapai dengan memasang spanduk pengumuman yang berisi laporan keuangan desa Lau Bekeru untuk tujuan akuntabilitas masyarakat tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat ada beberapa masyarakat mungkin belum memahami mekanisme yang terlibat sehingga masyarakat yang tidak paham belum merasakan manfaat akan

akuntabilitas laporan keuangan di desa Lau Beker, sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat setempat tentang akuntabilitas keuangan desa.

Berdasarkan penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang pengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X_3) terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil penelitian *thitung* sebesar $3,401 > 1664$ dengan signifikan $0,001 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari penelitian Andika Subandra (2022) yang berjudul pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Pebenaan kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penelitian variabel partisipasi masyarakat (X_3) tersebut menunjukkan hasil uji t H_a diterima dan H_o di tolak sehingga hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Pebenaan kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini juga di dukung dari penelitian sebelumnya dari penelitian Maju Siregar (2020) yang berjudul pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa

terhadap pembangunan desa (studi kasus di desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat) dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil uji t H_a diterima dan H_o di tolak sehingga hasil penelitian partisipasi masyarakat (X_3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (studi kasus di desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat) . Menurut Hasniati (2017) partisipasi masyarakat ialah salah satu atas bagian subjek atau permusyawaratan dalam pembangunan desa, yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan desa yang disebut musrenbang, aspek kontrol dan pengawasan pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa.

Partisipasi masyarakat bukan saja sebagai penunjang pengambilan keputusan pengelolaan keuangan desa tetapi juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi dalam pengelolaan keuangan desa yang ada. Partisipasi ini dapat meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan desa. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

4. Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan perhitungan F_{hitung} sebesar 27,997 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,11 yang dapat dilihat pada $\alpha=0,05$, sedangkan nilai signifikan

yang tertera pada tabel sebesar 0,000 sehingga dapat dijelaskan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan keuangan Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari penelitian Andika Subandra (2022) yang berjudul pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pada desa Pebenaan kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penelitian variabel pengelolaan keuangan desa (Y) tersebut menunjukkan hasil uji F H_a diterima dan H_0 di tolak sehingga hasil penelitian transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini juga di dukung dari penelitian sebelumnya dari penelitian Wahyu Aditya (2022) yang berjudul analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap alokasi dana desa di kelurahan sekecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil uji F H_a diterima dan H_0 di tolak sehingga hasil penelitian transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap alokasi dana desa di kelurahan sekecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa perlu adanya suatu aspek tata

pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun unsur dari aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat. (Yuliansyah, 2016).

Oleh karena itu, pemerintah sangat diharapkan untuk tetap memperhatikan dan menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan pembangunan desa tepat sasaran sesuai yang diharapkan. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan keuangan desa pada desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa Lau Bekeri kecamatan Kutalimbaru, penelitian ini menggunakan penelitian analisis regresi linier berganda dengan sampel penelitian sebanyak 80 responden.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data yang telah dilakukan tentang” Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Lau Bekeri.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Lau Bekeri.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Lau Bekeri.
4. Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Lau Bekeri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pemerintah desa dapat meningkatkan informasi pengelolaan keuangan desa dimana memaksimalkan penggunaan internet dan media sosial lainnya untuk keterbukaan informasi pelayanan desa dan program-program desa kedepannya sehingga masyarakat dapat mengakses lebih mudah dan cepat tanggap dalam mendapatkan informasi dari pemerintah desa sehingga masyarakat dapat lebih mempercayai kinerja pemerintah desa sebab partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah berguna untuk kemajuan pemerintah desa.
2. Untuk peneliti kedepannya:
 - a. Diharapkan dapat menambah informasi dan teori-teori penelitian sebelumnya dalam penelitian ini
 - b. Menggunakan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh data yang lebih berkualitas
 - c. Memperluas daerah observasi dan sampel penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Afrijal, 2018.” *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)*”. Skripsi S-1 Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia.
- Amrullah Rifkayanti, 2019.” *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo
- Andriani Matia, 2018.” *Pengaruh Transparans, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa)*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa.
- Ardiyanti Rika, 2019.” *Pengaruh Transprasi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro KecamatanKragan Kabupaten Rembang*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Dewi Icha, 2019.” *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dwi Riska, 2021.” *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar*’. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nikmah Unsihlatun, 2022.” *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyrakat Dalam Pengelolaan Dna Desa Terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso*”. Skrisp S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Oktavia Norni, 2020. *'Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma'*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkyu, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Rama Yanti Elisa, 2023.” *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh*’. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*. Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023
- Rosmiana Mia, 2020.” *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Siregar Maju, 2020.” *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabuptaen Langkat)*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darma Agung Medan.
- Subandra Andika, 2022.” *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Sukmawati Fitri, 2019.” *Pengaruh Tansparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama.
- Ultafiah Weni, 2017.” *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dwiyanto Agus, 2016. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: GadjahMada University Press
- Ghozali Imam, 2018. *Aplikasi Analisis Dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Ramadona, 2016. *Akuntansi Lanjutan 1*. Jakarta: Rajawali Scoots

William, 2015. *Financial Accounting Theory*. Jakarta Sugiyono, 2015.

Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Supriyono, 2016. *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Yuliansyah, Rusmianto, 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.

Undang-undang Kementerian Dalam Negeri Nomor 611 Pasal 1 Tahun 2018 Tentang Desa.

Undang-undang Kementerian Dalam Negeri Nomor 611 Pasal 29 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

<https://portal.deliserdangkab.go.id>

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

<https://kotalimbaru.deliserdangkab.go.id>

<https://www.merdeka.com>

<https://www.perwatanews.com>

<https://www.antaraneews.com>

<https://www.e-news.id>

<https://www.tribunnews.com>